

BAB 1

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi yang luar biasa, tidak semua orang mampu mengikuti percepatan teknologi itu, termasuk guru. Guru yang biasa melaporkan kinerja atau mengumpulkan nilai secara manual, sekarang harus menggunakan teknologi informasi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran disebutkan bahwa penerapan kurikulum pada masa kondisi khusus dianggap belum dapat mengatasi ketertinggalan pembelajaran. Ketertinggalan pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran yang terjadi selama masa pandemi Covid-19 yang melanda dunia, khususnya Indonesia. Munculnya pandemi Covid-19 tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan pada hampir semua lini kehidupan manusia.

Pada bidang pendidikan, kondisi tersebut juga mengakibatkan perubahan yang cukup signifikan, khususnya moda pembelajaran yang selama ini dilaksanakan secara tatap muka atau luring menjadi moda daring. Adanya perubahan yang sangat mendadak tersebut menyebabkan banyak pihak yang merasa belum siap menerima kenyataan bahwa pembelajaran harus dilakukan secara daring.

Hal ini ditunjukkan dengan munculnya berbagai masalah di bidang pembelajaran seperti kesulitan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran serta berkurangnya bahkan hilangnya motivasi untuk mengikuti pembelajaran. Keputusan Menteri tersebut disusul dengan pengesahan kurikulum merdeka sebagai kurikulum nasional.

Merdeka Belajar Episode 15 tentang Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar (PMM). Peluncuran Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar (PMM) ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menerbitkan surat edaran untuk kepala dinas pendidikan provinsi, kepala dinas pendidikan kota/kabupaten, kepala sekolah dan guru di seluruh Indonesia. Salah satu isi surat tersebut adalah perintah kepada kepala sekolah dan guru untuk mengembangkan diri dengan memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar (PMM).

Kegiatan pengembangan diri merupakan salah satu tugas yang harus dipenuhi oleh guru dalam rangka pengembangan keprofesian berkelanjutan. Perintah tersebut berlaku untuk

seluruh kepala sekolah dan guru baik yang sekolahnya sudah mendaftar implementasi kurikulum merdeka maupun yang belum mendaftar.

Mengamati kebijakan yang dikeluarkan, salah satu kebijakan yang dianggap menyulitkan bagi para guru yang sudah memasuki usia lima puluh ke atas, yaitu kebijakan Platform Merdeka Mengajar (PMM). Platform Merdeka Mengajar (PMM) merupakan media pembelajaran yang dapat diunduh secara gratis melalui *App store*, yang dapat digunakan untuk membantu kelancaran tugas guru-guru penggerak dalam memimpin pembelajaran.

Aplikasi yang digunakan ini dapat membantu guru memahami tentang kurikulum merdeka serta mengembangkan kemampuan guru dalam memberikan materi sehingga materi dapat di terima dengan mudah. Selama tahun 2023, para pengguna yang menggunakan Platform Merdeka Mengajar (PMM) yaitu sebanyak 3.540.856 peserta.

Di samping itu, sebanyak 225.400 sekolah telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dan menggunakan Platform Merdeka Mengajar (PMM) dengan cukup baik yaitu sekitar 2.219.099 Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka telah mengakses Platform Merdeka Mengajar (PMM), serta 267.024 PTK telah mengunggah 774 ribu lebih bukti karya pada PMM (Kemendikbudristek, 2024).

Platform Merdeka Mengajar (PMM) diciptakan untuk membantu pendidik dalam pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik, Platform Merdeka Mengajar (PMM) terdapat fitur pelatihan mandiri guna menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan pendidik serta dapat menghasilkan sebuah produk yang dapat bekerja untuk menginspirasi sesama pendidik lainnya. Menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan tidak mengenal kapan dan dimana. Platform Merdeka Mengajar (PMM) diciptakan untuk para pendidik dan pimpinan sekolah untuk bersama-sama menunjang proses pembelajaran menjadi lebih inovatif dan kreatif yang terfokus pada peserta didik. Platform Merdeka Mengajar (PMM) menjadi sumber belajar dan dapat diterapkan sesuai kebutuhan dan hasil evaluasi peserta didik.

Sebagai wadah dalam berbagi praktik, Platform Merdeka Mengajar (PMM) menyediakan fitur untuk berkarya. Ada lima kategori yang disarankan oleh Platform Merdeka Mengajar (PMM), yang dibagi menjadi pembelajaran dan pengembangan pendidik. Produk untuk pengembangan guru seperti: Video Inspiratif, yang dibuat oleh para profesional dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, merupakan alat yang berguna bagi instruktur untuk meningkatkan kemahiran mereka dan guru memiliki akses ke sumber daya pelatihan mandiri kapan saja dan dari lokasi mana pun.

Materi tersebut terdiri dari serangkaian sesi pelatihan singkat dan portofolio bernama *Proof of My Work*, yang berfungsi sebagai sarana untuk menampilkan pencapaian, kemampuan,

dan kinerja pendidik secara umum. Pendidik dapat berkomunikasi dan bertukar teknik efektif di Platform Merdeka Mengajar (PMM). Hasil akhir kegiatan belajar mengajar adalah: penilaian siswa, yang memfasilitasi analisis diagnostik kemampuan literasi dan numerasi oleh guru dalam rangka menerapkan pengetahuan pada pertumbuhan dan fase akademik siswa; Perangkat Pengajaran: kumpulan sumber daya, termasuk alat bantu belajar, alat bantu proyek, modul belajar, dan buku teks, untuk meningkatkan kegiatan belajar mengajar.

Jadi, Platform Merdeka Mengajar (PMM) merupakan suatu wadah digital yang memudahkan tenaga pendidik dalam mendukung proses pembelajaran, sehingga meningkatkan hasil belajar siswa melalui pengajaran yang inovatif, terarah, dan berpusat pada siswa. Kemampuan Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang membantu pendidik dalam mengembangkan kemampuannya diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa (Eryanti, 2024).

Kebijakan tersebut mengharuskan para guru untuk mengisi program kerja setiap bulannya. Pada kenyataannya tidak semua guru bisa melakukan hal tersebut. Efisiensi serta kompetensi guru di bidang pendidikan perlu di tingkatkan oleh Kementerian pendidikan dan Kebudayaan. Oleh sebab itu, sebuah platform khusus guru telah diciptakan sebagai pengembangan potensi dan keterampilan para pendidik, karena tujuan utama dari Platform Merdeka Mengajar (PMM) yaitu untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki pendidik dan berupaya menginspirasi pendidik-pendidik lainnya.

Platform Merdeka Mengajar (PMM) memberikan kesempatan yang sama kepada pendidik untuk belajar dan meningkatkan keterampilannya di mana pun dan kapan pun. Fitur “Pembelajaran” pada Platform Merdeka Mengajar (PMM) memberikan kesempatan pelatihan mandiri kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk memperoleh berbagai materi pelatihan berkualitas tinggi dan mempelajarinya secara mandiri.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menduga (**pernyataan masalah**) Implementasi Kebijakan belum optimal. Hal ini di duga karena belum terlaksanakannya variabel implementasi kebijakan, variabel yang belum optimal adalah sumber daya manusia. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran disebutkan bahwa penerapan kurikulum pada masa kondisi khusus dianggap belum dapat mengatasi ketertinggalan pembelajaran. Ketertinggalan pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran yang terjadi selama masa pandemi Covid-19 yang melanda dunia, khususnya Indonesia. Munculnya pandemi Covid-19

tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan pada hampir semua lini kehidupan manusia., oleh sebab itu saya tertarik melakukan penelitian ini.

Variabel yang belum terlaksana dengan baik adalah kapabilitas dan kompetensi guru, ternyata mengalami kesenjangan dalam bidang teknologi informasi yang menyebabkan terhambatnya kinerja para guru,hal ini lebih umum terjadi pada guru-guru yang berusia lanjut.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya tentang maksud diadakan Platform Merdeka Mengajar (PMM), SMAN 12 Bandung memanfaatkan platform tersebut untuk membantu guru untuk mengumpulkan pengisian tugas mandiri (Pamungkas & Nurjanah, 2024). Selain itu, Platform Merdeka Mengajar (PMM) ini juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi guru di SMAN 12 Bandung.

Hal ini terbukti dari ungkapan kepala sekolah SMAN 12 Bandung yang mengungkapkan bahwa setelah menerapkan kurikulum merdeka, banyak siswa yang berhasil masuk perguruan-perguruan tinggi negeri. Penerapan Platform Merdeka Mengajar (PMM) di sekolah ini dibantu karena adanya program Komunitas belajar (KOLAJAR) SMAN 12 di Bandung yang didalamnya bertujuan untuk membantu dalam mengakases Platform Merdeka Mengajar (PMM).

Berkaitan dengan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti terkait implementasi Platform Merdeka Mengajar (PMM) di SMAN 12 Bandung. Dengan maksud untuk mengetahui bagaimana Implementasi Platform Merdeka Mengajar (PMM) di SMAN 12 Bandung dengan menggunakan teori Van Meter & Van Horn, dengan memperhatikan keenam variabel nya yaitu aspek standar, sasaran kebijakan dan tujuan kebijakan, aspek sumber daya, aspek komunikasi antar organisasi terkait, aspek karakteristik organisasi pelaksana, dan aspek sikap para pelaksana (Ropingah et al., 2022).

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sasaran dan kebijakan yang digunakan di SMAN 12 Bandung dalam mengimplementasikan Platform Merdeka Mengajar (PMM).
2. Untuk mengetahui kompetensi dan kapabilitas sumber daya yang terdapat di SMAN 12 Bandung dalam mengimplementasikan Platform Merdeka Mengajar (PMM).
3. Untuk mengetahui karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi Platform Merdeka Mengajar (PMM)
4. Untuk mengetahui sikap para pelaksana yang terdapat dalam implementasi Platform Merdeka Mengajar (PMM)

5. Untuk mengetahui komunikasi diantara organisasi terkait kegiatan dan pelaksanaan Platform Merdeka Mengajar(PMM)
6. Untuk mengetahui kondisi lingkungan sosial ,ekonomi , dan politik yang ada di SMAN 12 Bandung dalam Implementasi Platform Merdeka Mengajar

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberi manfaat:

1. Bagi guru, diperolehnya suatu pemahaman tentang implementasi Platform Merdeka Mengajar (PMM), sehingga menunjang penerapan kurikulum merdeka.
2. Bagi institusi, diperolehnya ketepatan implementasi Platform Merdeka Mengajar (PMM), dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum merdeka.
3. Bagi peneliti, menambah pengalaman dan pengetahuan untuk mengembangkan kemampuan dalam penelitian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sasaran dan kebijakan yang digunakan di SMAN 12 Bandung dalam mengimplementasikan Platform Merdeka Mengajar (PMM)?
2. Bagaimana kompetensi dan kapabilitas sumber daya yang terdapat di SMAN 12 Bandung dalam mengimplementasikan Platform Merdeka Mengajar (PMM) ?
3. Bagaimana karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi Platform Merdeka Mengajar (PMM)?
4. Bagaimana sikap para pelaksana yang terdapat dalam implementasi Platform Merdeka Mengajar (PMM)?
5. Bagaimana komunikasi diantara organisasi terkait kegiatan dan pelaksanaan Platform Merdeka Mengajar(PMM)?
6. Bagaimana kondisi lingkungan sosial ,ekonomi , dan politik yang ada di SMAN 12 Bandung dalam Implementasi Platform Merdeka Mengajar?

E. Kerangka Pemikiran

Teori Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn, menyatakan bahwa implementasi berdasarkan teori ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut penulis, seandainya pemahaman dan pengetahuan guru tentang kurikulum merdeka telah baik, maka guru dapat mengimplementasikan Platform Merdeka Mengajar (PMM) dalam pembelajaran sehari-hari serta meningkatkan kualitas pembelajaran kurikulum merdeka, sebaliknya seandainya pemahaman guru belum sepenuhnya baik maka guru akan menghadapi hambatan dalam mengimplementasikan Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang dikembangkan di sekolah diharapkan mampu menjadi partner guru dalam implementasi kurikulum merdeka dengan semangat kolaborasi dan saling berbagi. Konten-konten yang dikembangkan oleh kemendikbudristek memberikan pemahaman lebih saat implementasi dan pembelajaran di satuan Pendidikan yang telah ikut serta dalam implementasi kurikulum merdeka.

Teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini yaitu teori implementasi yang dicanangkan oleh Van Metter & Van Horn. Dalam teorinya menyatakan bahwa terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu: aspek standar, sasaran kebijakan dan tujuan kebijakan, aspek sumber daya, aspek komunikasi antar organisasi terkait, aspek karakteristik organisasi pelaksana, dan aspek sikap para pelaksana (Ropingah et al., 2022).

Adriansyah (2018) menyatakan bahwa implementasi berdasarkan teori ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi menyangkut terhadap beberapa hal yaitu adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, adanya hasil kegiatan.

Adriansyah (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pendekatan yang dirumuskan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn bersifat *top-down* dan disebut dengan *A Model of The Policy Implementations*. Menurut Van Meter dan Horn bahwa terdapat enam variabel yang harus diperhatikan karena dapat memengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan, Maksudnya adalah perincian mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur pencapaiannya. Menurut Djiko (2018) menyatakan bahwa standar dan kebijakan suatu kebijakan memiliki standar dan sasaran kebijakan yang harus dicapai tentang program. Dalam suatu kebijakan yang dibuat perlu mempertimbangkan apakah kebijakan telah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, dalam pembuatan kebijakan tidak hanya ingin

melihat kebijakannya telah dilaksanakan namun juga ingin mengetahui seberapa jauh kebijakan tersebut telah memberikan konsekuensi positif atau negatif bagi masyarakat.

2. Sumber daya, Menurut Djiko (2018) dalam jurnal yang berjudul “Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Halmahera Utara” menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, sumber daya merupakan suatu hal yang dapat menunjang keberhasilan kebijakan yang telah dibuat. Implementasi kebijakan perlu adanya dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia, maupun sumber daya non manusia (Adriansyah, 2018). Sumber daya manusia adalah pelaku kebijakan atau pelaksana kebijakan. Sedangkan sumber daya non-manusia adalah sumber daya anggaran, fasilitas, dan waktu. Implementor dalam mengimplementasikan kebijakan diperlukan kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sehingga dalam suatu kebijakan yang diimplementasikan dapat memanfaatkan sumber daya baik sumber daya manusia atau non manusia. Pemanfaatan sumber daya yang baik dimaksudkan agar dapat menunjang pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
3. Hubungan antar Organisasi, Dalam banyak program proses implementasi perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Maka dari itu, diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Menurut Djiko (2018) menyatakan bahwa komunikasi antar organisasi merupakan hal penting untuk menunjang keberhasilan dari kebijakan. Dalam hal ini, komunikasi yang dimaksud adalah bahagimaa pihak-pihak yang terlibat dalam menjalankan kebijakan melakukan koordinasi untuk mencapai tujuan dari kebijakan yang dibuat.
4. Karakteristik agen pelaksana, Mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan memengaruhi proses implementasi suatu program. Menurut Firmansyah et al., (2019) dalam jurnal yang berjudul “Implementasi Program Indonesia Pintar pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama Dilihat dari Karakteristik Agen Pelaksana (Studi pada SMPN Satu Atap 1 Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timor) menyatakan bahwa pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi non formal yang akan terlibat dalam proses implementasi kebijakan. Hal ini sangatlah penting, sebab kinerja implementasi kebijakan publik akan dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan yaitu apakah mendukung atau menolak; bagaimana opini

publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. Menurut Grenada & Rahman dalam Djiko (2018) menyatakan bahwa sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

6. Disposisi implementor, Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan mempengaruhi keberhasilan kinerja implementasi kebijakan. (Firmansyah et al., 2019). Menurut Adriansyah (2018) dalam jurnal yang berjudul Implementasi Persatuan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Kearsipan (Studi pada pengelolaan arsip dinamis di kantor Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang) disposisi implementor ini mencakup beberapa aspek penting yaitu:
 - a. Respons implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.
 - b. Kognisi, yaitu pemahaman terhadap kebijakan
 - c. Intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.



Bagan 1. 1 Kerangka Pemikiran Implementasi Kebijakan Platform Merdeka Mengajar (PMM)

